



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024



(0351) 891 321



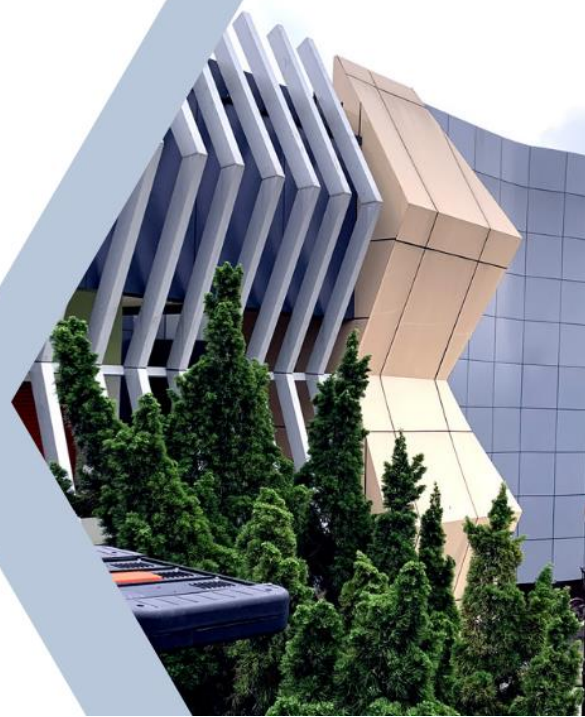
JL. PAHLAWAN NO. 5, MAGETAN



DPMPTSP@MAGETAN.GO.ID



WWW.DPMPTSP.MAGETAN.GO.ID



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024.

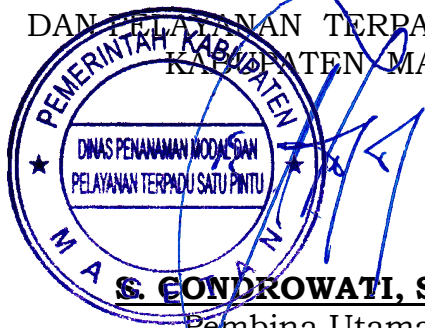
Renja Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2024 tidak terlepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dengan perencanaan program kerja Tahunan Kabupaten Magetan dalam satu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Ditetapkan di : Magetan
Tanggal : 02 - 10 - 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR ... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan ... | 3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 15 |
| 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD | 17 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD | 30 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 33 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visidan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Magetan tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang di operasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program kegiatan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan program kegiatan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas program kegiatan.
- e. Memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan : uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan : Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan RKPD

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah : Mencakup evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu dan tahun berjalan terhadap RPJMD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah : Berisikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat daerah, serta isu isu strategis lainnya

- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD : Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat : Hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para masyarakat dan pengumpulan informasi dan pengamatan lapangan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional : Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah : Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
- 3.3 Program Kegiatan : Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun direncanakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2024, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja periode Tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2022. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2022, besarnya capaian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam Tabel T.C 29 sebagaimana berikut. :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------------------|---|---|---|----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.1.1 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Cakupan potensi yang dipromosikan. % | 85 | Persen | 85 | | | | | 85 | 100% |
| 1.1.1.1 | Penyelenggaraan pameran investasi | Jumlah pameran investasi. Kegiatan | 17 | Kegiatan | 17 | | | | | 17 | 100% |
| 1.1.1.2 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | | | | | 1 | 100% |
| 1.1.1.3 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal. Dokumen | 24 | Dokumen | 24 | | | | | 24 | 100% |
| 1.1.1.4 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti. Kegiatan | 4 | Kegiatan | 4 | | | | | 4 | 100% |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Cakupan potensi yang dipromosikan | 50 | Persen | 87 | 88 | 88 | 100% | | 88 | 176% |
| 2.18.03.2 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman | Jumlah kegiatan promosi dan | 25 | Kali | 25 | 8 | 8 | 100% | | 33 | 132% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|---|----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 01 | Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | publikasi Dokumen | | | | | | | | | |
| 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pameran Investasi dan Publikasi | 24 | Kali | 24 | 4 | 8 | 200% | | 28 | 117% |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah dokumen kajian promosi dokumen | 1 | Dokumen | 0 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.1.2 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Prosentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun % | 40 | Prosen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.1.2.1 | Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal | Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun. Dokumen | 1 | Dokumen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.1.2.2 | Kajian kebijakan penanaman modal | Jumlah dokumen kajian penanaman modal. Dokumen | 3 | Dokumen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.1.2.3 | Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah | Jumlah peserta rakor. Orang | 160 | Orang | | | | | | 0 | 0% |
| 1.1.3 | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | Prosentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. % | | Prosen | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1.1.3.1 | Monitoring dan pengendalian kegiatan | Jumlah monitoring yang dilaksanakan. | 12 | Kegiatan | | | | | | 0 | 0% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|--|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | penambahan bahan galian C | Kegiatan | | | | | | | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun | 90 | Persen | 70 | 77 | 77 | 100% | | 147 | 163% |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal dokumen | 5 | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | | 1 | 20% |
| 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Kajian penanaman Modal dokumen | 4 | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | | 1 | 25% |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal dokumen | 1 | Dokumen | 0 | 0 | - | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 2.18.02.2.01.01 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah peta potensi investasi yang disusun. Dokumen | 3 | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | | 1 | 33% |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah peta potensi investasi yang disusun. Dokumen | 2 | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | | 1 | 50% |
| | Penyusunan Rencana | Jumlah dokumen | 1 | Dokumen | 0 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | 0% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|---|---|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | perencanaan dan pengembangan penanaman modal Dokumen | | | | | - | | | | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal | 90 | Persen | 70 | 80 | 80 | 100% | | 150 | 167% |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian penanama modal dokumen | 72 | Dokumen | 12 | 24 | 24 | 100% | | 36 | 50% |
| 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal dokumen | 36 | Dokumen | 12 | 0 | - | #DIV/0! | | 12 | 33% |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah peserta rakor dan bimbingan teknis penanaman modal orang | 300 | Orang | 108 | 300 | 300 | 100% | | 408 | 136% |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal dokumen | 36 | Dokumen | 0 | 12 | 12 | 100% | | 12 | 33% |
| 1.2.1 | Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Prosentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. % | 90 | Persen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.1.1 | Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang | 6500 | Dokumen | | | | | | 0 | 0% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------|--|--|---|----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | diterbitkan. Dokumen | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dokumen | 48 | Dokumen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.1.3 | Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP | Jumlah anggota forum komunikasi PTSP. Orang | 60 | Orang | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.1.4 | Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan | Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan. Dokumen | 2 | Dokumen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.1.5 | Penguatan Mutu Pelayanan Publik | Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan. Kegiatan | 2 | Kegiatan | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.1.6 | Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik | Prosentase pelayanan publik yang diintegrasikan. Persen | 80 | Persen | | | | | | 0 | 0% |
| 1.2.3 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | persentase pengaduan masyarakat yang tertangani. % | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1.2.3.1 | Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat | Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. % | 100 | Persen | | | | | | 0 | 0% |
| 2.18. | PROGRAM PELAYANAN | Persentase | 100 | Persen | | 100 | | 100% | | 100 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|--|--|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 04 | PENANAMAN MODAL | pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. | 0 | | 100 | | 100 | | | | |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik dokumen | 12.500 | Dokumen | 5.143 | 4000 | 5.865 | 147% | | 9143 | 73% |
| 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan. dokumen | 72 | Dokumen | 24 | 24 | 23 | 96% | | 48 | 67% |
| 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah penyelenggaraan layanan pengelolaan pengaduan Bulan | 36 | Bulan | 0 | 0 | - | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 2.18.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah anggota forum komunikasi PTSP Orang | 100 | Orang | 0 | 50 | 50 | 100% | | 50 | 50% |
| 1.2.2 | Program Pengembangan | Prosentase data dan | 90 | Persen | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------|---|---|---|----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Database dan Informasi | informasi yang dikembangkan. % | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah data yang dikelola. Dokumen | 18 | Dokumen | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.2.2.2 | Pengembangan Sistem Informasi | Jumlah sistem informasi yang dikembangkan. Aplikasi | 5 | Aplikasi | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.2.2.3 | Pembangunan Tempat Reklame | Jumlah tempat reklame yang dibangun. Unit | 10 | Unit | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.2.2.4 | Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi | Jumlah publikasi dan sosialisasi. Kali | 16 | Kali | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.2.3 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | persentase pengaduan masyarakat yang tertangani. % | 100 | Persen | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 1.2.3.1 | Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat | Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Kali | 100 | Kali | | | | #DIV/0! | | 0 | 0% |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase data dan informasi yang dikembangkan | 100 | Persen | 80 | 90 | 90 | 100% | | 170 | 170% |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang | Junlah aplikasi pengelolaan data yang | 90 | Persen | 2 | 90 | 90 | 100% | | 92 | 102% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|---|----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | dikembangkan Aplikasi | | | | | | | | | |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Junlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan aplikasi | 6 | Aplikasi | 2 | 1 | 1 | 100% | | 3 | 50% |
| 1.1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat Angka | 80 | Angka | 80 | | | #DIV/0! | | 80 | 100% |
| 1.1.1.1 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan. Bulan | 24 | Bulan | 24 | | | #DIV/0! | | 24 | 100% |
| 1.1.1.2 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat. Dokumen | 2 | Dokumen | 2 | | | #DIV/0! | | 2 | 100% |
| 1.1.1.3 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. Bulan | 24 | Bulan | 24 | | | #DIV/0! | | 24 | 100% |
| 2.1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % | 90 | Persen | 90 | | | #DIV/0! | | 90 | 100% |
| 2.1.2.1 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan. | 5 | Unit | 5 | | | #DIV/0! | | 5 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------|--|---|---|--------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Unit | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun. Unit | 1 | Unit | 1 | | | #DIV/0! | | 1 | 100% |
| 2.1.2.3 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan. Unit | 100 | Unit | 100 | | | #DIV/0! | | 100 | 100% |
| 2.1.2.4 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor. Gedung | 3 | Gedung | 3 | | | #DIV/0! | | 3 | 100% |
| 2.1.2.5 | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor. Kali | 24 | Kali | 24 | | | #DIV/0! | | 24 | 100% |
| 2.1.2.6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Kali | 26 | Kali | 26 | | | #DIV/0! | | 26 | 100% |
| 3.1.3 | Program peningkatan disiplin aparatur | persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas % | 100 | Persen | 100 | | | #DIV/0! | | 100 | 100% |
| 3.1.3.1 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan. Stel | 80 | Stel | 80 | | | #DIV/0! | | 80 | 100% |
| 4.1.4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi. % | 100 | Persen | 100 | | | #DIV/0! | | 100 | 100% |
| 4.1.4.1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan | 20 | Orang | 20 | | | #DIV/0! | | 20 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------|---|--|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | pelatihan. Orang | | | | | | | | | |
| 4.1.4.2 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis. Orang | 80 | Orang | 80 | | | #DIV/0! | | 80 | 100% |
| 5.1.5 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu. % | 100 | Persen | 100 | | | #DIV/0! | | 100 | 100% |
| 5.1.5.1 | Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun. Dokumen | 4 | Dokumen | 4 | | | #DIV/0! | | 4 | 100% |
| 5.1.5.2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Dokumen | 13 | Dokumen | 13 | | | #DIV/0! | | 13 | 100% |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | Angka | 87 | 80 | 98,71 | 123% | | 166,51 | 208% |
| 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dokumen | 8 | Dokumen | 4 | 1 | 1 | 100% | | 5 | 63% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|---|--|---|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Dokumen | 5 | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 100% | | 4 | 80% |
| 2.18.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat. Dokumen | 3 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100% | | 2 | 67% |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan | 51 | Dokumen | 14 | 12 | 2 | 17% | | 26 | 51% |
| 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen gaji Pegawai dokumen | 45 | Dokumen | 14 | 12 | 12 | 100% | | 26 | 58% |
| 2.18.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran yang disusun. dokumen | 6 | Dokumen | 4 | 1 | 1 | 100% | | 5 | 83% |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Orang | 55 | Orang | 55 | 40 | - | 0% | | 95 | 173% |
| 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan Stell | 120 | stell | - | 5 | - | 0% | | 5 | 4% |
| 2.18.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis Orang | 55 | Orang | 55 | 40 | 40 | 100% | | 95 | 173% |
| 2.18. | Administrasi Umum | Jumlah penyediaan | 12 | Bulan | | 12 | | 100% | | 24 | 200% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|--|--|---|-------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 01.2.06 | Perangkat Daerah | jasa dan pelayanan administrasi perkantoran bulan | | | 12 | | 12 | | | | |
| 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit | 114 | Unit | 61 | 12 | 12 | 100% | | 73 | 64% |
| 2.18.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan bulan | 36 | Bulan | 9 | 12 | 12 | 100% | | 21 | 58% |
| 2.18.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah kebutuhan perjalanan dinas aparatur bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa perkantoran bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|---|---|---|-----------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya unit | 152 | unit | 50 | 12 | 12 | 100% | | 62 | 41% |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor bulan | 36 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | | 24 | 67% |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 45 | Unit | 16 | 13 | 11 | 85% | | 29 | 64% |
| 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan Kendaraan | 42 | Kendaraan | 14 | 12 | 12 | 100% | | 26 | 62% |
| 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Gedung | 3 | Gedung | 2 | 1 | 2 | 200% | | 3 | 100% |

2.1.1 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran pelaksanaan renja tahun lalu menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan penyampaian LKPM dan berupaya memberikan iklim penanaman modal yang kondusif. Pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperlukan pengoptimalan pengendalian penanaman modal yang meliputi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal dan pengawasan penanaman modal, meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, peningkatan proses pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU melalui pengembangan aplikasi, meningkatkan sarana dan prarana di Mal Pelayanan Publik. Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2022, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

| No | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (Thn n-2) | Tahun 2021 (Thn n-1) | Tahun 2022 (Thn n) | Tahun 2023 (Thn n+1) | Tahun 2021 (Thn n-2) | Tahun 2022 (Thn n-1) | Tahun 2023 (Thn n) | Tahun 2024 (Thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai realisasi investasi | | | 250.M | 300.M | 400.M | 1.500 M | 1,136 M | 1,551 M | 1.570 M | 1.580 M | |
| 2 | Jumlah investor. | | | 450 | 875 | 1120 | 1380 | 4392 | 4319 | 3000 | 3100 | |
| 3. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. | | | 78 | 79 | 80 | 81 | 83,96 | 98.71 | 82 | 88 | |
| 4. | Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.. | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2024 – 2026.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
2. Penyempurnaan sistem *Online Single Submisiion* (OSS) sesuai dengan perkembangan
3. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
4. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi yang belum optimal
5. Masih terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi penanaman modal
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga mempengaruhi nilai investasi.

2.3.1. Tantangan

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
2. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
3. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
5. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
6. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

2.3.2. Peluang

Adapun peluang bagi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Potensi investasi yang melimpah.
2. Terjalannya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
3. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop maupun seminar.

4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
9. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|----------------|---|-------------|---|-----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Kepuasan ASN DPMPSTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPSTSP | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Kepuasan ASN DPMPSTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPSTSP | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 5.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Magetan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 50.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Magetan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 35.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Magetan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3.078.721.228 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Magetan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/ Bulan | 2.541.195.780 |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------|----------------|---|-------------|--|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab Magetan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Dokumen | 15.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab Magetan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Dokumen | 3.000.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Magetan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Stell | 50.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Magetan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Stell | - |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Magetan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Pegawai | 100.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Magetan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Pegawai | 55.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|--|----------------|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 30.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 300.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 150.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab Magetan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Bulan | 30.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab Magetan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 30.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 70.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Magetan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 6.724.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Magetan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Magetan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan | 12.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 10.000.000 |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------|----------------|---|-------------|--|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 120.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Magetan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Magetan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | 175.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 175.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 60.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 20 Orang | 750.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Magetan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 495.500.000 |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|--|----------------|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Magetan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 16 Unit | 95.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Magetan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 16 Unit | 100.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Magetan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Gedung | 200.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Magetan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Gedung | 125.000.000 |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Kab Magetan | Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Kab Magetan | Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun | | |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|---|-----------------|----------------|--|-------------|---|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal dokumen | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal dokumen | | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | 30 Pelaku Usaha | 15.000.000 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Kab Magetan | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kab Magetan | Jumlah Perubahan data Potensi dan Peluang investasi | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Kab Magetan | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 1 Daerah | 20.000.000 |
| | Program Promosi Penanaman Modal | | Cakupan potensi yang dipromosikan | | | Program Promosi Penanaman Modal | | Cakupan potensi yang dipromosikan | | |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|---|----------------|----------------|--|-------------|---|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 8 Kali | 550.000.000 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kab Magetan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 8 Kali | 475.000.000 |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | | Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | | Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. | | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan | | |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------|--|-------------------|----------------|---|-------------|---|-------------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab Magetan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5000 Pelaku usaha | 200.000.000 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab Magetan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2000 Pelaku usaha | 150.000.000 |
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 12 Kegiatan | 25.000.000 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 12 Kegiatan Usaha | 20.000.000 |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|---|-------------|--|------------------|----------------|---|-------------|--|-----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Kab Magetan | Jumlah kegiatan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 12 Kegiatan | 20.000.000 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Kab Magetan | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 40 Pelaku Usaha | 40.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 100 Pelaku usaha | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen | 10.000.000 |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen pengendalian penanama modal | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen pengendalian penanama modal | | |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|---|------------------|----------------|--|-------------|--|------------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 330 Pelaku Usaha | 25.000.000 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kab Magetan | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 0 Pelaku Usaha | - |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 300 Pelaku Usaha | 350.000.000 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Kab Magetan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 300 Pelaku Usaha | 10.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 330 Pelaku Usaha | 25.000.000 | Pengawasan Penanaman Modal | Kab Magetan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan | 10 Pelaku Usaha | 10.000.000 |

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----|--|-------------|---|----------------|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan | | |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan | | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab Magetan | Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikembangkan | 1 Aplikasi | 150.000.000 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kab Magetan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen | 50.000.000 |
| | JUMLAH | | | | 6.745.721.228 | JUMLAH | | | | 4.813.419.780 |

Dalam Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdapat perbedaan antara Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Indikator Rencana Awal dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Indikator pada Hasil Analisa Kebutuhan. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perubahan pada peraturan dimana sebelumnya nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Indikator mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, kemudian peraturan tersebut dirubah ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuain sesuai dengan peraturan yang terbaru.

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disajikan dalam tabel T.C. 3.2

Tabel T.C 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Magetan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Program / kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Catatan |
|----|--------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu kegiatan baik pada perusahaan maupun daerah dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi maupun membuka peluang usaha baru untuk memperoleh keuntungan. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman modal atau investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan. Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan

Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 503/4033/SJ, bahwa daerah agar mendukung kesiapan PTSP kabupaten/kota dalam menghadapi implementasi program *Online Single Submission* (OSS) tersebut dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan pelayanan dengan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu

Reformasi birokrasi saat ini mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Pemerintah sebagai representasi publik harus membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis. Salah satu perubahan dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan pelayanan dengan penerapan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan. Sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Melalui kerangka kerja ini maka pemerintah membuat kebijakan Mal Pelayanan Publik yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat. Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik diharapkan pertumbuhan ekonominya akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan public dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena tergabung dalam satu area sehingga membuat pelayanan administratif menjadi lebih cepat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

strategis. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah meningkatkan kinerja bidang investasi dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetana dalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatkan Jumlah Investor.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

TABEL TC. 25

| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------|-------------------|
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 - 2026 | | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatkan Kinerja bidang investasi | | Nilai Realisasi investasi | 600 Milyar Rupiah | 700 Milyar Rupiah | 800 Milyar Rupiah |
| | | Meningkatnya Jumlah Investor | Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 88 | 88.5 | 90 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Prosentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan sesuai SOP | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani | 100% | 100% | 100% |

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Perlengkapan dan Perlatan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan'
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- 2.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- 2.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

3. Program Promosi Penanaman Modal

- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

- b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana disajikan dalam Tabel TC 33.

Tabel T.C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | 4.813.419.780 | | | | | 7.163.721.228 | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | | | 4.813.419.780 | | | | | 7.163.721.228 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 4.860.000.000 | | | | | 5.533.721.228 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 40.000.000 | | | | 7 Dokumen | 85.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun. | 2 Dokumen | 5.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 5 Dokumen | 25.000.000 | DPMPTSP |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 1 Laporan | 35.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan | 2 Dokumen | 60.000.000 | DPMPTSP |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|---|--|--|----------------------|-------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa di Pasal 1 Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan laporan keuangan | | 2.544.195.780 | | | | | 3.098.721.228 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/Bulan | 2.541.195.780 | Kabupaten Magetan | DAU | | 14 Bulan | 3.078.721.228 | DPMPTSP |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / triwulanan/ semesteran yang disusun. | 2 Dokumen | 3.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 2 Dokumen | 20.000.000 | DPMPTSP |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis | | 55.000.000 | | | | | 180.000.000 | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|---|--|--------------------|-------------------|----------------|---|---------------------|--------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan | 0 Stell | - | Kabupaten Magetan | DAU | Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menggunakan Pakaian Dinas Khusus | 50 Stell | 60.000.000 | DPMPTSP |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis | 50 Pegawai | 55.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. | 50 Pegawai | 120.000.000 | DPMPTSP |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | | 428.724.000 | | | | | 750.000.000 | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 12 Paket | 25.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 35.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | 150.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 325.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | 12 Paket | 30.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 35.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor | 12 Paket | 68.724.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 75.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Paket | 25.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 65.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 Dokumen | 10.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 15.000.000 | DPMPTSP |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelayanan perjalanan dinas | 12 Laporan | 120.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 200.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor | | 745.500.000 | | | | | 1.070.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | 12 Bulan | 175.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 185.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Bulan | 60.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Bulan | 85.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 20 Orang | 495.500.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 20 Orang | 800.000.000 | DPMPTSP |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 225.000.000 | | | | | 350.000.000 | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan | 16 Unit | 100.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 16 Unit | 100.000.000 | DPMPTSP |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. | 2 Gedung | 125.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | Rehab gedung MPP /DPMPTSP | 2 Gedung | 250.000.000 | DPMPTSP |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun | | 25.000.000 | | | | | 20.000.000 | |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal | | 5.000.000 | | | | | 20.000.000 | |
| | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen | 5.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 30 Pelaku Usaha | 20.000.000 | DPMPTSP |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | 20.000.000 | | | | | - | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|---|--|--------------------|-------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 1 Daerah | 20.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 0 | - | DPMPTSP |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Cakupan potensi yang dipromosikan | | 475.000.000 | | | | | 600.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi | | 475.000.000 | | | | | 600.000.000 | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 8 Kali | 475.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | Pameran Investasi, Promosi Baliho Luar Daerah, Star Up Investasi, Matchmaking investasi, Pembinaan Csr | 8 Kali | 600.000.000 | DPMPTSP |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur. | | 220.000.000 | | | | | 395.000.000 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan | | 220.000.000 | | | | | 395.000.000 | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 2000 Pelaku usaha | 150.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 5500 Pelaku usaha | 225.000.000 | DPMPTSP |
| | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 12 Pelaku Usaha | 20.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Kegiatan | 25.000.000 | DPMPTSP |
| | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 40 Pelaku Usaha | 40.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 12 Kegiatan | 25.000.000 | DPMPTSP |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen | 10.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 100 Pelaku usaha | 120.000.000 | DPMPTSP |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal | | 20.000.000 | | | | | 440.000.000 | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian penanama modal | | 20.000.000 | | | | | 440.000.000 | |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 0 Pelaku Usaha | - | Kabupaten Magetan | DAU | | 330 Pelaku Usaha | 30.000.000 | DPMPTSP |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 300 Pelaku Usaha | 10.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 300 Pelaku Usaha | 375.000.000 | DPMPTSP |
| | Pengawasan Penanaman Modal | 10 | 330 Pelaku Usaha | 10.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | | 330 Pelaku Usaha | 35.000.000 | DPMPTSP |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan | | 50.000.000 | | | | | 175.000.000 | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan | | 50.000.000 | | | | | 175.000.000 | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen | 50.000.000 | Kabupaten Magetan | DAU | Pengembangan aplikasi MPP Digital | 1 Aplikasi | 175.000.000 | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2024 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAGETAN
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 4.813.419.780,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.813.419.780,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 4.813.419.780,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Kepuasan ASN DPMPPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPPTSP</i> | - | | | 88 Angka | 4.023.419.780,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan. Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu</i> | - | | | 3 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</i> | - | | | 100 % | 2.544.195.780,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 28 Orang/bulan | 2.541.195.780,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | | | | 2 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</i> | - | | | 50 Orang | 55.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | | | | 50 Orang | 55.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 84 Paket | 428.724.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 150.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 120.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | - | | | 36 Laporan | 730.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 175.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 2 Unit | 125.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | <i>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</i> | - | | | 100 % | 25.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan/Insentif Penanaman Modal</i> | - | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 125.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | <i>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</i> | - | | | 100 % | 25.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan/Insentif Penanaman Modal | - | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i> | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang disusun</i> | - | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i> | | | | 1 Daerah | 20.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | <i>Prosentase Cakupan Potensi yang di Promosikan</i> | - | | | 100 % | 475.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</i> | - | | | 8 Kali | 475.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Keterampilan dan Keterampilan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i> | | | | 8 Dokumen | 475.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Keterampilan dan Keterampilan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | <i>Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Operasional Prosedur</i> | - | | | 100 % | 220.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | <i>Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i> | - | | | 2000 Dokumen | 220.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 2000 Pelaku Usaha | 150.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 40 Pelaku Usaha | 40.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | - | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i> | | | | 12 Kegiatan Usaha | 20.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Prosentase Pengendalian Penanaman Modal | - | | | 100 % | 20.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i> | - | | | 300 Usaha | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i> | | | | 0 Kegiatan Usaha. | 0,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Penzinaan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Penzinaan Berusaha Berbasis Risiko</i> | | | | 300 Pelaku Usaha | 10.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i> | | | | 10 Kegiatan Usaha | 10.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Prosentase Data dan Sistem Informasi yang dikembangkan | - | | | 100 % | 50.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data yang di Kembangkan | - | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Magetan, Magetan, Tambran | DANA UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Kemitraan dengan stakeholder untuk penguatan ekonomi masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| J U M L A H | | | | | | | | 4.813.419.780,00 | | | | | | | 0,00 | |

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2024 telah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga rencana kerja ini dapat dijadikan acuan kerjanya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.